

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Tinjauan Pustaka:	13
1.5.1 Kajian Monarki: Dari Tema Klasik ke Tema baru	13
1.5.2 Memaknai <i>political settlements</i>	20
1.6 Kerangka Analisis.....	31
1.7 Metode Penelitian	34
1.8 Sistematika Penulisan	36
BAB II KEISTIMEWAAN DIY DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA	38
2.1 Institusi Pengambil keputusan Yang Bersifat Tradisional Dan Modern: Karakteristik Dan Perbedaannya	38
2.2 Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah	41
2.3 UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Penguatan dan Substansi Keistimewaan Dalam Kelembagaan	46
2.4 Tata Kelola Pemerintah DIY Dan Hubungan Antar Lembaga.....	50
2.5 Tata Kelola Pemerintahan DIY Dan Hubungannya Dengan Kesultanan....	57
2.6 Kesimpulan.....	63
BAB III KESULTANAN DAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DIY.....	65
3.1 Kesultanan Dan Sistem Pemerintahan Modern: Mengikuti Kehendak Jaman	66
3.2 Telusur Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta	92
3.3 Kesimpulan.....	119
BAB IV RELASI KESULTANAN DAN LEMBAGA PERWAKILAN: TERBENTUKNYA PEMUFAKATAN POLITIK	122
4.1 Pembentukan Parlemen di Yogyakarta: Awal Keterlibatan Rakyat:.....	122

4.2	Dinamika Perkembangan Parlemen di Yogyakarta dan Kebijakan Pertanahan	129
4.3	Proses Pembentukan UUK DIY No. 13 Tahun 2012	131
4.3.1	Respon Awal Reformasi Politik Indonesia.....	131
4.3.2	Ketegangan Dalam Upaya Penyeragaman Nasional: Pendorong Disahkannya UUK DIY.....	143
4.3.3	Hasil Negosiasi: Tercapainya Pemufakatan	150
4.4	Relasi Kuasa DPRD Dengan Kesultanan Dalam Pembuatan Perda Pertanahan.	153
4.5	Kesimpulan.....	160
BAB V PENUTUP.....		165
DAFTAR PUSTAKA		171
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu-isu Kesultanan Yogyakarta yang disepakati dengan pihak lain.....	11
Tabel 2.1	Perbedaan Karakteristik Institusi Tradisional dan institusi Modern....	40
Tabel 2.2	Jenjang Kepangkatan Abdi Dalem Keprajan (Birokrat) dan Abdi Dalem Punokawan (Masyarakat), Kalenggahan No. 01/Pran/KHPP/XII/2004	59
Tabel 3.1	Daftar Sultan dan Patih di Kesultanan Yogyakarta.....	69
Tabel 3.2	Perkembangan Pengaturan SG dan PAG	115
Tabel 4.1	Draft UU Keistimewaan berdasarkan organisasi pengusulnya.....	139
Tabel 4.2	Gerakan Protes dalam isu Keistimewaan Yogyakarta dari tahun 1998-2011	146
Tabel 4.3	Haluan dan Wacana tentang Keistimewaan Yogyakarta	149
Tabel 4.4.	Hubungan Hukum Pengaturan Pertanahan	159
Tabel 4.5	Political Settlements Kasultanan dengan berbagai pihak dalam perumusan UUK DIY	162

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia	42
Bagan 2.2	Klasifikasi Urusan Pemerintahan	43
Bagan 2.3	Urusan Pemerintah Yang di Otonomikan berdasar UU No 23 Tahun 2014	45
Bagan 2.4	Struktur Perangkat Daerah DIY	52
Bagan 2.5	Sruktur Organisasi Paniradya Kastimewaan	53
Bagan 2.6	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	56
Bagan 3.1	Tata kelola Pemerintahan Kraton Yogyakarta.	76